

**ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAH DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PEMBANGUNAN DESA**

(Studi Kasus Desa Pa'nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa)



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Oleh :
Munawir Kadir
NIM: 10500112025

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan pada kode etik ilmiah.

Gowa, November 2015

Penyusun

MUNAWIR KADIR
NIM : 10500112025



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “ Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pa’nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa)”, yang di susun oleh saudara Munawir Kadir, NIM: 10500112025, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasah yang diselenggarakan pada hari kamis, tanggal 10 Maret 2016, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil akhir 1437 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Gowa, 10 Maret 2016

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Halim Talli, M.Ag	(.....)
Munaqisy I	: Istiqamah, SH.,MH	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Hamsir, M.Hum	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Abdillah Mustari, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Andi Safriani, SH.,MH	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Syari’ah & Hukum,
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Hidayah, Karunia serta izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pa’nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa)**” sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat serta salam tak lupa penulis hanturkan kepada Nabi yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Rampungnya skripsi ini, penulis mempersembahkan untuk orang tua tercinta ayahanda **H. Abd Kadir Dg Kulle** dan Ibunda tercinta **Ramlah Dg Ni’ni** yang tak pernah bosan dan tetap sabar mendidik, membesarkan, memberi dukungan, memberi semangat serta senantiasa mendoakan penulis, “**You’re the Best motivator**”.Terimakasih kepada sahabat saya **Muh. Nursyam. Amd. Kem**, dan **Yudianto** yang selalu bersedia ketika penulis meminta bantuan.

1. Teruntuk Bapak **Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si**, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar,
2. Teruntuk Bapak **Prof. Dr. Darussalam, M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak **Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag**, selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan pengembangan lembaga, **Bapak Dr. Hamsir, SH.,M.Hum** selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, **Dr. H. M. Saleh**

- Ridwan, M.Ag**, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Segenap Pegawai Fakultas yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Teruntuk Ibu **Istiqamah, SH., M.H** selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak **Rahman Syamsuddin, SH., M.H.** selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang selalumemberikanbimbingan, dukungan, Nasehat, motivasi demi kemajuan penulis.
 4. Teruntuk Bapak **Dr. Abdillah Mustari. M. Ag** dan Ibu **Andi Safriani. SH., MH.** Selaku pembimbing skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, motivasi, demi kemajuan penulis.
 5. Teruntuk Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu, membimbing penulis dan membantu kelancaran sehingga dapat menjadi bekal bagi penulis dalam penulisan hokum ini dan semoga penulis dapat amalkan dalam kehidupan di masa depan penulis.
 6. Teruntuk pemerintah desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa pa'nakkukang serta pihak terkait dalam penulisan ini yang sudah turut barpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.
 7. Terima Kasih kepada Sahabat saya **Rahmat Nur** dan **Ahmad Quraisy, Muliawansyah** jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2012 yang selalu menemani dalam Menyelesaikan skripsi ini dan telah memberikan motivasi, semangat serta dukungan kepada saya.
 8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Hukum terkhusus Angkatan 2012 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar : **Sri Rahayu Kartika**

Syarif, Ratna Wati, Irvan Syafar, Akbar, Rijal Ajidin, Hendra, Rafik Kabianto, Kamelia Karim Dwi Putri, Nuriasmin, Apriadi Pratama, Kasmawati Arfa, Ferawati Alwi, Fatihani Baso, Arif, Hadzrul, Rahmawati Idrus, Andi Bau Utari, Haris, Kalman. Dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih telah menambah pengalaman dan cerita dalam hidup dan akan selalu menjadi kenangan.

9. Teman-teman **KKN PROFESI UIN** Alauddin Makassar Angkatan VI tahun 2015 di Kementerian Agama Kabupaten Gowa yang selalu saling menyemangati satu sama lain dalam hal penyelesaian Study.
10. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini baik secara materil maupun formil.

Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hokum ini. Semoga penulisan hokum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Gowa, 29 Februari 2016

Penulis

Munawir Kadir
NIM : 10500112025

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK.....	x
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1-14
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
 BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	 15-36
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Desa.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Badan Permusyawaratan Desa....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Pembangunan Desa.....	30
D. Teori Pengawasan.....	34
E. Kerangka Konseptual.....	36
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	 37-40
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Sumber Data.....	38
D. Metode Pengumpulan Data	39
E. Instrumen Penelitian.....	40

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	40
G. Pengujian Keabsahan Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42-75
A. Gambaran Umum Desa Pa'nakkukang.....	42
B. Hubungan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Pa'nakukang, Kecamatan Pallangga, Gowa.....	48
C. Faktor Yang Menjadi Kendala Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Pemerintahan Di Desa Pa'nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa.....	69
BAB V PENUTUP.....	76-77
A. Kesimpulan.....	76
B. Implikasi Penelitian.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	81
RIWAYAT HIDUP.....	82

DAFTAR TABLE

- TABEL I : Pemanfaatan lahan desa Pa'nakkukang (halaman : 42)
- TABEL II : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Halaman : 44)
- TABEL III : Struktur Organisasi BPD Desa Pa'nakkukang (halaman :46)



ABSTRAK

Nama : Munawir Kadir

Nim : 10500112025

**Judul : Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dan Badan
Permasyarakatan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa
Pa'nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa)**

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pa'nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa)? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) bagaimana hubungan pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam pembangunan desa di desa Pa'nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa? 2) Faktor apa sajakah yang menjadi kendala pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan desa dalam menjalankan hubungan pemerintahan di desa Pa'nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa?

Jenis penelitian ini tergolong Kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan yuridis normatif, adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi wawancara, Dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun secara sekunder, lalu kemudian tehnik pengolahan dan analisa data yang dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa terkait fungsi Badan Permasyarakatan Desa dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari Tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan peraturan desa telah dilaksanakan dengan baik dan juga melibatkan partisipasi masyarakat, dan fungsi pengawasan dari BPD terhadap jalannya pemerintahan desa yang di laksanakan pemerintah desa sudah cukup baik, baik terkait dengan pengawasan peraturan desa maupun pengawasan terhadap kinerja dari Kepala Desa, namun partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan jalannya peraturan desa masih sangat kurang. Sementara dalam hal Fungsi menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlalu efektif, sesuai apa yang di dapatkan peneliti di lapangan bahwa, masih ada beberapa warga masyarakat di Desa Pa'nakkukang Kurang begitu mengetahui tugas dan wewenang dari BPD, karena kurangnya sosialisasi BPD kepada masyarakat berkenaan dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan faktor yang menjadi kendala dalam hubungan pemerintahan antara pemerintah desa dan BPD yaitu: Partisipasi masyarakat, tingkat pendidikan dari anggota BPD yang masih tergolong rendah, dan kerjasama dengan Kepala Desa.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Perlu dilakukan kerja sama antara pemerintah Kabupaten Gowa dengan Perguruan Tinggi, khususnya Fakultas Hukum

untuk memberikan pembekalan mengenai *legal drafting* kepada BPD dan pemerintah desa. 2) BPD sebagai unsur dari pemerintahan desa, dengan wewenang menggali, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat harus lebih meningkatkan sosialisasi mengenai tugas dan fungsi BPD kepada masyarakat. 3) Antara pemerintah desa dan BPD adalah mitra dalam pemerintahan desa, untuk itu mereka harus saling sinergi antara satu dengan yang lainnya, dan menghormati dan menghargai serta mengesampingkan arogansi masing-masing, semata-mata untuk kemajuan desa. 4) Pemerintah dan masyarakat agar bisa saling bersinergi untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa atau yang di sebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara kesatuan Republik Indonesia terbentuk. sebagai bukti keberadaanya, penjelasan pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan, bahwa “ dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “ *zelfbesturende landsschappen* “ dan “ *volksgemeenschappen* ”, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di minangkabau, dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan Asli dan oleh karnanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa, oleh sebab itu, keberadaanya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Desa yang merupakan lingkup organisasi atau merupakan susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan msyarakat, mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi yang di amanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. dari sinilah dapat di tentukan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan, baik itu dari tingkat daerah mupun dari tingkat pusat melalui tugas pembantuan yang di berikan kepada pemerintah desa, kemudian menyalurkan

¹Drs. Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet Ke 3. (Malang, Setara press, 2014), h. 13

program bantuan kepada masyarakat. Dalam UU Pasal 1 angka 1 desa telah di sebutkan bahwa:

Desa merupakan desa dan desa adat yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisonal yang di akui dan di hormati dalam sistem negara kesatuan indonesia.²

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah desa di bentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat. ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Ali Imran/3: 26

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

Katakanlah, “Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kekuasaan dari orang yang

²UU No 6 tahun 2014 dan PP tahun 2015 Tentang Desa, Cet; 1 (Bandung, Citra Umbara, 2015). h. 2

*Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.*³

sedangkan kewenangan dari desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala Desa
3. Kewenangan yang di tugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Kewenangan lain yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. sama halnya dengan tingkat daerah maupun pusat di dalam menjalankan pemerintahan di bantu dan bekerja sama dengan badan eksekutif maupun legislatif dengan adanya pembagian kekuasaan⁵. Begitu pula di tingkat desa, dalam menjalankan roda pemerintahanya, Kepala Desa tidaklah bekerja sendiri, namun di bantu oleh perangkat desa yang lain seperti sekretaris desa dan yang lainnya. Badan Permusyawaratan Desa(BPD) merupakan perwujudan dari sistem demokrasi, di dalam UU Desa mengatakan bahwa BPD merupakan lembaga

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahanya*. (Jakarta, CV Kathoda, 2005). h. 66

⁴Pasal 19 UU N0 6 tahun 2014 tentang Desa

⁵HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh* cet. Ke 2 (Jakarta: Raja grafindo persada, 2004), h. 3

yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD dilihat dari wewenangnya dapat dikatakan sebagai lembaga legislatif di tingkat Desa, sedangkan pemerintah desa dan perangkat desa yang lainnya adalah lembaga eksekutif. Di bentuknya BPD merupakan hasil dari reformasi dari perwujudan demokrasi di tingkat desa. BPD mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu untuk menggali, menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga BPD di tingkat desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Hubungan antara BPD dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara BPD dan kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa dan APBDes. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dan

pembangunan desa, BPD mempunyai peran normative sebagai alat control pemerintah desa.⁶

Kehadiran BPD dengan sejumlah fungsi yang melekat padanya menjadikan BPD sebagai sebuah institusi yang memiliki kekuasaan besar di tingkat desa, selain kekuasaan Kepala Desa yang selama ini telah ada. Kedudukan yang kuat ini, juga dapat dilihat dari wewenang dan hak yang dimiliki oleh BPD. Wewenang yang dimaksudkan adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 61 Butir 1 & 2 menyebutkan Hak BPD Yaitu:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
- b. Menyatakan Pendapat atas Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Dan pemberdayaan Masyarakat Desa.⁷

Di dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa menyatakan Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati atau Walikota, dan memberikan

⁶<http://blogspot.com/2014/bpd-sebagai-lembaga-desa>, Di akses pada pukul 08. 45 WITA 15 Juni 2015

⁷Budiman Sudjatmiko dan Yando Zakaria. *Desa Hebat, Indonesia Kuat!* Cet: 1(Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2014). h. 84

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat desa.⁸

Kepala desa dalam hal ini bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan, Karna hal tersebut sudah menjadi kewenangan dari Pemerintah Desa dan BPD. ini sesuai dengan firman allah dalam QS Al-Anbiya/21: 73.

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Terjemahannya:

"Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah,"⁹

Ayat ini berbicara pada tataran ideal tentang sosok pemimpin yang akan memberikan dampak kebaikan dalam kehidupan rakyat secara keseluruhan, seperti yang ada pada diri para nabi manusia pilihan Allah. Karena secara korelatif, ayat-ayat sebelum dan sesudah ayat ini dalam konteks menggambarkan para nabi yang

⁸ Lihat Pasal 15 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2005 Tentang Desa

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 456

memberikan contoh keteladanan dalam membimbing umat ke jalan yang mensejahterakan umat lahir dan bathin. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ayat ini merupakan landasan prinsip dalam mencari figur pemimpin ideal yang akan memberi kebaikan dan keberkahan bagi bangsa dimanapun dan kapanpun. Hal ini senada dengan Hadits Nabi Muhammad SAW, yang di Riwayatka oleh Imam Bukhari mengenai sosok pemimpin yang ideal.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلُ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَخْطُهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

Artinya: “Abu Nu’aim menceritakan kepada kami berita dari Abu al-Asyhab, al-Hasan berkata , Ubaidillah bin Ziyad menjenguk Ma’qilbin Yasar ketika ia sakit yang menyebabkan kematiannya, maka Ma’qal berkata kepada Ubaidillah Bin Ziyaad,” Aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadis yang telah aku dengar dari Rasulullah Saw . aku telah mendengar Nabi SAW bersabda,”Tiada seorang hamba yang diberi amanat rakyat oleh Allah tidak akan merasakan padanya harumnya surga (melainkan tidak mendapat bau surga)”¹⁰.

Hadits tersebut menjelaskan bahwa dalam pandangan islam, seorang pemimpin adalah orang yang diberi amanat oleh Allah Swt. Untuk memimpin rakyat, yang di akhirat kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Swt. Sebagaimana telah di jelaskan di atas . Dengan demikian, meskipun seorang pemimpin dapat meloloskan diri dari tuntutan rakyatnya, karena ketidakadilannya, Misalkan, ia tidak akan mampu meloloskan diri dan tuntutan Allah swt kelak di akhirat. Oleh karena itu,

¹⁰ Drs. Muh. Rusdi T.,M.Ag. *Hadits Tarbawiy*. Cet: II (Makassar: Alauddin Press, 2015). h. 125-126

seorang pemimpin hendaknya jangan menganggap dirinya sebagai manusia super yang bebas berbuat dan memerintah apa saja kepada rakyatnya. Akan tetapi, sebaliknya, ia harus berusaha memposisikan dirinya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat.

Konsepsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah untuk memberikan fungsi kontrol yang kuat kepada Kepala Desa. Selain itu, dikenalkannya Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk memperkenalkan adanya lembaga legislatif, dan mempunyai kewenangan-kewenangan legislasi pada umumnya di desa.

Adapun fungsi BPD yang berkaitan dengan pemerintah desa atau dengan kata lain kepala Desa sesuai yang terdapat dalam UU Desa Pasal 55 yaitu:

1. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.¹¹

dengan fungsi legislasi, kontrol, dan penggalangan aspirasi, membuat BPD menggeser posisi dan fungsi politik Kepala Desa. Hal ini akan membawa akibat yang luas dalam tarik-menarik politik di desa.

Telah begitu banyak peraturan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tanpa implementasi yang jelas menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui Bagaimana sebenarnya kinerja BPD itu dalam kaitanya dengan pemerintah desa, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam

¹¹ Pasal 55 UU Desa.

penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih di butuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu: *“Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pa’nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa)”*

B. Focus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Skripsi ini berjudul “ Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dan BPD Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pa’nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa)”. Untuk memberikan arah yang tepat terhadap masalah yang dibahas, penulis berusaha memberikan pengertian kata-kata yang berkaitan dengan judul skripsi ini:

-Analisis ialah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹²

-Yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah, yuridis bersifat memaksa dimana seseorang harus mematuhi. Yuridis tidak hanya dalam bentuk tertulis, namun juga dalam bentuk lisan, yuridis yang

¹² Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia* (Surabaya: Reality Publisher, 2008), h. 60.

tertulis berupa Undang-undang sedangkan yuridis dalam bentuk lisan adalah hukum adat.¹³

-Hubungan adalah keadaan berhubungan, bersambung atau berangkai (yang satu dengan yang lain), berkaitan, bersangkutan.¹⁴

-Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

-Pemerintah Desa adalah sebagaimana yang di maksud dalam pasal 3 UU Desa adalah kepala atau yang di sebut dengan nama lain¹⁵

-Badan Permusyawaratan Desa(BPD) adalah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.¹⁶

-Pembangunan Desa dalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik, dalam aspek pendapatan,

¹³[http: //www. Pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/.html](http://www.Pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/.html).diakses pada pukul 07.00 WITA 16 JUNI 2015

¹⁴Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, h. 65

¹⁵Pasal 25 UU Desa

¹⁶Othiel bobsuni. “ *Fungsi Dan Peran BPD Dalam Pemerintahan Desa (Studi di Kabupaten Kupang)*, ” Tesis Program Megister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, 2008, h. 12

kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia.¹⁷

Dengan demikian, dari pengertian kata kata yang telah di berikan seperti di atas yang berkaitan dengan Judul Skripsi ini, pembaca di harap dapat lebih mengetahui arah yang Jelas/tepat terhadap masalah yang akan di bahas dalam penulisan Skripsi ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Hubungan Pemerintah Desa Dan BPD Dalam Pembangunan Desa Di Desa Pa'nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa?
2. Faktor Apasajakah yang menjadi Kendala Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka menjalankan hubungan Pemerintahan di Desa Pa'nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa?

D. Kajian pustaka

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah

¹⁷Othil bobsuni. " *Fungsi Dan Peran BPD Dalam Pemerintahan Desa (studi di kabupaten kupang*, h. 14

yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Ratna sofiana dengan judul “tinjauan yuridis peran badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam peningkatan demokrasi di Kecamatan kasihan kabupaten Bantul provinsi daerah istimewa Yogyakarta”, skripsi tersebut membahas tentang peran BPD dalam peningkatan demokrasi masyarakat dengan mengedepankan asas-asas demokrasi, dimana kekuatan tertinggi berada di tangan rakyat. selain hal tersebut, karya tulis ilmiah ini juga membahas apa saja kendala yang dialami BPD dalam peningkatan demokrasi masyarakat kecamatan kasihan kabupaten bantul.¹⁸

Karya ilmiah selanjutnya adalah yang ditulis oleh somadi alfaqih dengan judul “Peran Badan Permasyarakatan Desa dalam penyusunan peraturan desa (studi kasus di desa dumeling kecamatan wanasari kabupaten Brebes)”. skripsi ini membahas mengenai bagaimana peran BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa, dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses penyusunan dan penetapan perdes, serta upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.¹⁹

Selanjutnya Jurnal ilmiah karya M.Firman hadi dengan judul “Hubungan Fungsional Antara Pemerintah Desa dengan BPD dalam Pelaksanaan Pemerintahan

¹⁸Ratna sofiana , ”*Tinjauan Yuridis Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Peningkatan Demokrasi di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul* , ”skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

¹⁹Somadi Alfaqhi “ *Fungsi Badan Permasyarakatan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Perdes (Studi di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)*” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Desa Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jurnal ilmiah ini membahas mengenai hubungan fungsional antara pemerintah desa dengan BPD dalam pelaksanaan pemerintahan desa, serta pengaruh pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.²⁰

Dari beberapa karya tulis yang menjadikan BPD dan Pemerintah Desa sebagai Obyek penelitian tidak terdapat pembahasan tentang bagaimana Hubungan antara Pemerintah Desa dan BPD, serata Kendala-kendala yang di hadapi oleh Pemerintah Desa dan Badan Bermusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa, di tinjau dari Analisis Yuridis dan Politisnya.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Menjelaskan bagaimana hubungan pemerintah desa dan BPD dalam pembangunan desa
- b. Menjelaskan kendala-kendala yang di hadapi pemerintah desa dan BPD dalam rangka menjalankan hubungan sebagai upaya pembangunan desa

2. Kegunaan Penelitian

²⁰M.Firman hadi “*Hubungan fungsional Antara Pemerintah Desa Dengan BPD Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*”. Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013.

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi tentang persepsi masyarakat terhadap hubungan anatara pemerintah desa dan BPD dalam Pembangunan Desa di Desa Pa'nakkukang Kecamatan Pallangga, Gowa serta Kendala-kendala yang di hadapi dalam Hubungan Pemerintah Desa dan BPD di Desa tersebut. Adapun secara detail kegunaan tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya mengenai Hubungan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam pembangunan desa. Dan dapat bermanfaat juga selain sebagai informasi juga sebagai bahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat di gunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dalam hukum Tata Negara.

b. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang ada relevansinya dengan hasil penelitian ini, yang berkaitan dengan Analisis yuridis dan politis hubungan pemerintah desa dan badan permusyawaratan Desa(BPD) dalam pembangunan Desa.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Tinjauan Tentang Pemerintah Desa*

1. Pengertian Desa

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 mengartikan desa :

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak

¹HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Surabaya: Grafindo, 2002). h. 3

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut :

“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).³

Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan UU nomor 32 tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Sedangkan pengertian desa menurut UU Nomer 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa,

²UU No 5 tahun 1979 tentang Desa.

³UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pasal 1 ayat 12

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Sedangkan desa dalam artian administratif menurut Kartohadikusumo dalam Daldjoeni yaitu desa dijelaskan sebagai suatu kesatuan hukum yang mana tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.⁵

⁴ UU No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1

⁵ Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 Tentang Desa

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: *Pertama*, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, *kedua*, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, *ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, *keempat*, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, *kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, *keenam*, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

2. Pemerintah Desa

Pemerintahan Menurut S.Pramudji dapat di artikan secara luas dan sempit, pengertian secara luasnya adalah perbuatan pemerintah oleh Organ-organ atau badan-badan Legislatif, Eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan Negara, Sedangkan pemerintahan dalam Arti sempit adalah perbuatan memerintah yang di lakukan oleh organ eksekutif dan jajaranya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah Negara.

Pendapat yang sama di sampakan oleh Ramlan Surbakti yang menjelaskan, bahwa pemerintahan dalam arti luas itu menyangkut 3 fungsi utama

Dalam penyelenggaraan Negara, yaitu Fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif, Sedangkan dalam arti sempitnya hanya menjelaskan fungsi eksekutifnya saja.⁶

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa: “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”⁷. Selanjutnya dalam angka 7 Dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan “Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”⁸

Sedangkan dalam UU Nomer 6 tahun 2014 memberikan pengertian tentang, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa, menurut Nurcholis Pemerintah mempunyai tugas pokok:

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat

⁶Drs. Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet: Ke 3. (Malang, Setara press, 2014). h. 22

⁷Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 1 ayat 6

⁸Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 1 ayat 7

⁹UU Desa pasal 25

2. Menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Desa yang dimaksud di sini Kepala Desa. Ini sebagai lembaga eksekutif Pemerintah Desa yang berfungsi sebagai kepala Pemerintah di desa, kemudian dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa.

Perangkat Desa bertugas membantu kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintah desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa sebagaimana yang di maksud pada pasal 202 ayat 2 UU Nomor 32 tahun 2004, diisi dari pegawai Negeri sipil yang memenuhi persyaratan .penjelasan pasal 202 ini menyatakan dalam, Ayat (1) desa yang di maksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain Nagari di Sumatera Barat, Gampong di provinsi NAD, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, Negeri di Maluku, Ayat (2) yang di maksud dengan perangkat desa lainnya dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan seperti Kepala urusan, dan unsur kewilayahan sperti kepala dusun atau dengan sebutan lain. Ayat (3) Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri sipil secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri sipil sesuai peraturan Perundang-undangan.¹⁰

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedurnya pertanggung jawabannya disampaikan kepada

¹⁰Sarman dan Mohammad Taufik Makarso, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cet: Pertama, (Jakarta: Rineka cipta 2012). h. 288

Bupati atau Walikota melalui camat. Kepala Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada rakyat, menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun harus tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.¹¹

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya sudah diatur Oleh Undang –undang Desa yaitu UU No 6 Tahun 2014, Dan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada UU dan Peraturan Pemerintah.¹²

Berdasarkan Pasal 24 UU Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Berdasarkan Asas:

a. Kepastian Hukum

¹¹M. Firman hadi “*Hubungan Fungsional Antara Pemerintah Desa Dengan BPD Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*”, Skripsi (Mataram: Fak. Hukum Universitas Mataram. h. 5-6

¹²Sarman dan Mohammad taufik Makarso, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Cet: pertama, (Jakarta: Rineka cipta 2012), h.288

- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan Umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman, dan
- k. Partisipatif¹³

Sesuai dengan Pasal 26 Angka 1 UU Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan BPD mempunyai tugas bersama yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang telah diakomodasi atau ditampung oleh Kepala Desa dan BPD akan ditetapkan dalam bentuk peraturan desa dan APBdes. Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam pembangunan yakni membuat perencanaan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud

¹³ Lihat pasal 24 UU Desa

disusun oleh pemerintahan desa secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.¹⁴

Dalam melaksanakan tugasnya Sesuai dalam pasal 26 angka 2 UU Desa, Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa .
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara Partisipatif

¹⁴ Aprianus Umbu Reada Ndata Meha “*Dinamika hubungan badan permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan*”, skripsi (Yogyakarta: Sekolah tinggi pembangunan masyarakat Desa”APMD”, 2012), h. 17

- n. Mewakili desa di dalam maupun di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Desa atau yang di sebut dengan Kepala Desa berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel , transparan, profesional, efektif, dan efisien ,bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g. Menjalin kerja sama koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- i. Mengelola keuangan dan aset desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.

¹⁵ Lihat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 angka 2

- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial masyarakat desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.¹⁶

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di Desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diaggresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk

¹⁶ Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 4

mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014, memberikan pengertian Tentang BPD Yaitu: Badan Permusyawaratan Desa atau yang di sebut dengan Nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Rozali Abdullah menjelaskan bahwa :

“Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah suatu badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa, yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil yang dimaksud dalam hal ini adalah penduduk desa yang memegang jabatan seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat lainnya”. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun, sama dengan masa jabatan kepala desa, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Tata cara penetapan anggota dan pimpinan BPD diatur dalam perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Anggota BPD yang sudah ada pada saat berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tetap menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 ini, sampai berakhirnya masa jabatan¹⁷

Menurut HAW. Widjaja, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu adalah sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

¹⁷Lihat, M. firman Hadi, dalam skripsinya yang berjudul ‘*Hubungan fungsional Antara Pemerintah Desa Dengan BPD Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*’ mengutip pendapat dari Rozali abdullah. h. 7

2. a. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat.

Dimaksud dengan wakil dalam desa yang memangku jabatan seperti ketua rukun warga, tetangga, pemangku adat, dan tokoh masyarakat lainnya.

- b. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD.¹⁸

Anggota badan permusyawaratan desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis, adapun penambahan fungsi dari badan permusyawaratan Desa sesuai dengan yang terdapat dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.¹⁹

Sehubungan dengan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang datang dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui berbagai proses sebagai berikut :

1. Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD.

¹⁸HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Bandung: Setara Press, 2005) h. 279

¹⁹Lihat UU Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 55

2. Agresi adalah proses megumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi Peraturan Desa.
3. Formulasi adalah proses perumusan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan oleh BPD dan/atau oleh Pemerintah Desa.
4. Konsultasi adalah proses dialog bersama antara Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat.

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa di tetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan Wilayah, Perempuan, Penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Dan peresmian anggota badan permusyawran Desa di tetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa. Dan Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa ,pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.²⁰

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Anggota Badan permusyawaratan Desa wajib:

²⁰ UU Nomor 6 tahun 2014 pasal 61

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka tunggal ika.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti, aspirasi desa.
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat Masyarakat Desa, dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.²¹

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan Masyarakat Desa, masing-masing unsur Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara lain:

1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
3. Adanya prinsip saling menghormati;
4. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan

C. Tinjauan Tentang Pembangunan Desa

²¹ Lihat UU Nomer 6 tahun 2014 pasal 63

Pembangunan adalah perubahan yang dilakukan secara terencana dan menyeluruh yang dilakukan oleh negara-bangsa dalam rangka memperoleh kemajuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

Menurut Siagian, pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan secara berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Lebih jauh lagi dia menyatakan bahwa pembangunan mengandung aspek yang sangat luas salah satunya mencakup pembangunan di bidang politik.

Adapun pengertian pembangunan desa, sesuai dengan pasal 1 angka 8 UU nomor 6 tahun 2014 yaitu pembangunan desa adalah Upaya Peningkatan Kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.²²

Keberhasilan pembangunan desa juga merupakan wujud adanya efektifitas dan kemampuan serta etos kerja kepala desa dan aparatur pemerintah desa. Namun demikian banyak realitas di desa-desa banyak kepala desa tidak memiliki orientasi yang maju dalam menjalankan pemerintahan desa, hal ini banyak disebabkan banyak pemerintah desa tidak memiliki visi, misi dan rencana strategis yang memadai untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan pada masyarakat desa dari sosial ekonomi, politik dan fisik.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan

²² Lihat Pasal 1 angka 8 Undang Undang Desa

dasar , pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal ,serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia. Pembangunan di Desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP No 72 tahun 2005 ditegaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut di ditetapkan dalam RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APBDes. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.²³

Konsep pembangunan desa menjelaskan : pembangunan masyarakat adalah suatu gerakan untuk memajukan suatu kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, dengan partisipasi aktif, bahkan jika mungkin dengan swakarsa (inisiatif) masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu bagaimana menggugah dan menumbuhkembangkan partisipasi sangatlah diperlukan untuk proses pembangunan masyarakat itu sendiri (DEPDAGRI).

²³ Aprianus Uumbu Reada Ndata Meha “*Dinamika Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan*’ skripsi (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa”APMD”, 2012), h. 22

Menurut James Midley “pembangunan yang partisipatif menghasilkan tata pemerintahan yang lebih baik, kemakmuran yang lebih adil, pelayanan dasar yang lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak, akses ke pasar dan jasa bisnis yang lebih merata, organisasi masyarakat yang lebih kuat, dan kebebasan memilih yang lebih terbuka.”²⁴

Masalah-masalah dalam penyelenggaraan pembangunan di desa merupakan suatu yang perlu diperhatikan bersama antara Kepala Desa maupun BPD, serta masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam menentukan suatu program baik pembangunan fisik dan nonfisik dapat dirasakan manfaatnya dengan seksama bukan hanya orang tertentu saja. Untuk itu antara BPD dan Kepala Desa harus sejalan. Sebagai mitra Kepala Desa, seluruh anggota BPD juga diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun desa. Karena, salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan di sebuah desa, ditentukan oleh tinggi rendahnya dukungan yang diberikan masyarakat desa tersebut.

Dari berbagai tuntutan pembangunan, terkadang menjadi suatu polemik dan dinamika dalam pengelolaan serta penyelenggaraan pemerintahan desa, maka menyebabkan semakin vitalnya keberadaan lembaga auditor pemerintah desa yang berfungsi sebagai sebuah badan penyelenggara pemerintahan di desa.

Keberhasilan dari suatu pemerintahan terletak pada pemerintahannya sendiri, dalam hal ini pemerintah telah membuat Undang-undang mengenai pemerintahan

²⁴ Rahman Syah, *Menjawab Harapan Rakyat Refleksi Pemikiran Membangun Gowa* (Cet. 1; Makassar : Media Pustaka Utama, 2010), h. 33

desa, salah satunya adalah PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa, yang isinya menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BPD dan Kepala Desa merupakan patokan untuk keberhasilan dan sangat berperan dalam pembangunan desa. Dimana pembangunan desa itu meliputi ; pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan masyarakat desa, pembangunan kebudayaan dan pembangunan fisik desa. Pembangunan desa pada dasarnya mencakup keseluruhan aspek desa yang terdiri dari berbagai sektor dan program yang saling berkaitan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan banyuan dan bimbingan pemerintah, karena untuk meningkatkan pembangunan desa, baik peningkatan ekonomi maupun peningkatan taraf hidup sangat dipengaruhi kepemimpinan seseorang. Secara teori bahwa salah satu factor penunjang adalah pemimpin.²⁵

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud

²⁵<http://.blogspot.com/2012/05/proposal-penelitian.html>, di akses pada pukul 17.00 WITA 11 Juli 2015

disusun oleh pemerintahan desa secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMDes untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

D. Teori Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindarkan adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan di harapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah di tetapkan untuk mencapai tujuan yang telah di rencanakan secara efektif dan efisien .

Sujamto Mendefenisikan Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Sedangkan Fathoni mendefenisikan Pengawasan yaitu adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang di perlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.²⁶

²⁶Drs. Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet: Ke 3. (Malang, Setara press, 2014). h. 117

Sebagaimana di ungkapkan oleh Tjokroamidjojo, bahwa pengawsasan sangat penting dilakukan dengan tujuan:

1. Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana kegiatan berjalan sesuai dengan rencananya.
2. Apabila terjadi penyimpangan, maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya.
3. Dilakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan.

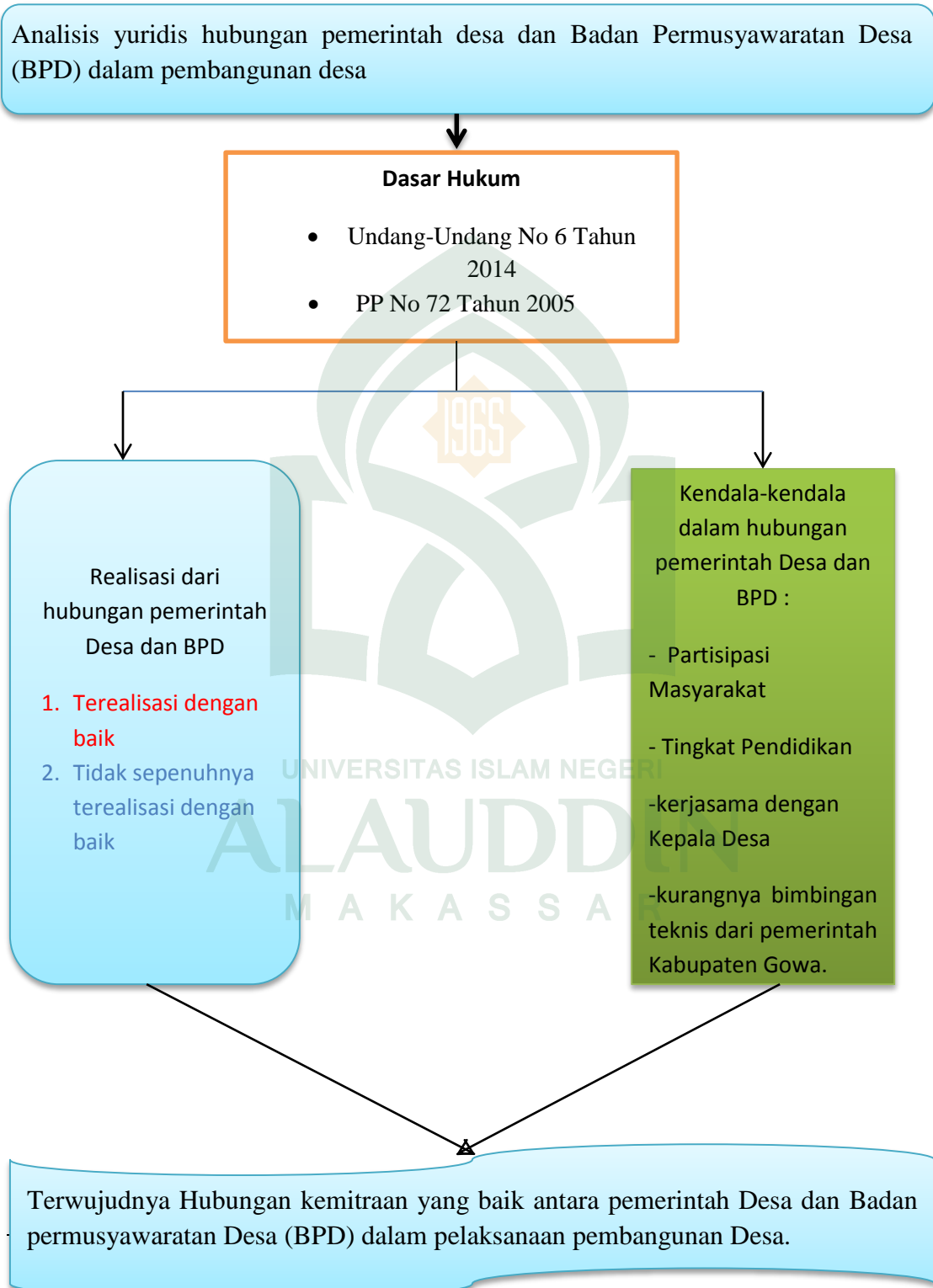
Jadi, pengawasan merupakan kegiatan yang penting karna tanpa pengawasan , maka kegiatan yang di lakukan tidak sesuai dengan rencana dan bisa mengakibatkan banyak penyelewengan-penyelewengan.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Disamping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

1. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
2. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
3. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.²⁷

²⁷Drs. Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet: Ke 3. (Malang, Setara Press, 2014), h. 122

E. Kerangka konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah di perlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah adalah sebagai berikut:

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

- a. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneltian yang dilakukan dilapangan dengan pengamatan langsung. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara kepada Kepala Desa Pa'nakkukang, ketua BPD, anggota BPD, beberapa tokoh Masyarakat, dan berbagai pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*), penulis mengkaji buku-buku terkait pemerintahan Daerah, pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, situs-situs internet, terhadap UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 2005 serta hal lain yang memiliki hubungan dengan pembahasan skripsi ini.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Pa'nakkukang Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Lokasi Penelitian ini dipilih karena, peneliti menganggap lokasi ini dinilai representatif untuk mewakili penelitian ini dalam

mengkaji dan menganalisis pelaksanaan hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam pembangunan Desa di Desa tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif*, yakni penelitian ini mengkaji data berdasarkan norma yang ada mengenai hubungan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan Desa (BPD) Dalam pembangunan desa. Dianalisa berdasarkan Undang-undang yang berlaku serta dengan menggunakan kaedah-kaedah hukum yang relevan dengan masalah tersebut.

C. Sumber Data

Dalam menyusun skripsi ini, data yang diperoleh dalam penelitian dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer merupakan sumber data yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .
2. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh dari litelatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumen pada instansi terkait.

3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus dan ensiklopedia.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode penggalan data sebagai berikut:

- a. Observasi

Adapun yang di maksud dengan observasi adalah pengamatan dengan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang di selidiki. yakni dengan mengamati secara langsung, dan masyarakat yang ada di Desa Pa'nakkukang.

- b. Wawancara

Metode wawancara yang di gunakan penyusun adalah menghubungi dan bertanya(berkomunikasi langsung) dengan informan guna mendapatkan data dan informasi di lapangan. pihak yang di maksud informan dalam penelitian ini adalah Kepala desa, Anggota BPD, kepala Dusun. dan pihak-pihak yang terkait lainnya seperti warga Masyarakat yang ada di Desa Pa'nakkukang, kecamatan pallangga, kabupaten Gowa.¹

¹Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial* Cet: V, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya. metode ini di gunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi anggota yang bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.²

E. Instrumen Penelitian

Bagian ini peneliti menjelaskan tentang alat pengumpul data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, yakni: peraturan perundang-undangan, wawancara dan studi dokumen.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

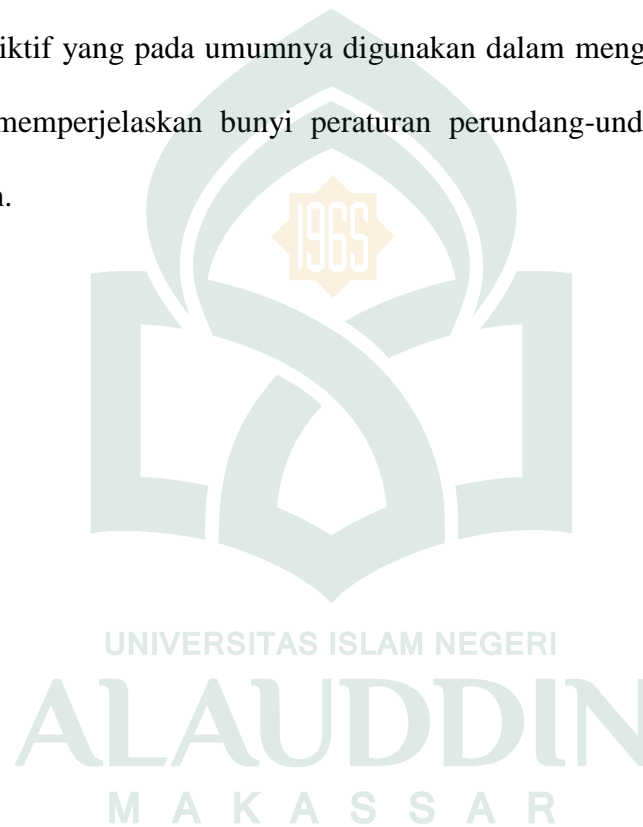
Penulis dalam megolah dan menganalisis data menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata – kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara , catatan, pengamatan lapangan, potret, dokumen perorangan, memorendum dan dokumen resmi, sehingga dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit.

²Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial*, h. 73

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam menguji data dan materi yang disajikan, diperlukan metode sebagai berikut:

1. Deduktif yang pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip atau memperjelaskan bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa pa'nakkukang

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Di sisi lain pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian.

a. Keadaan Umum

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang keadaan Desa Pa'nakkukang, maka berikut ini penulis akan memberikan gambaran secara singkat mengenai beberapa aspek penting untuk diketahui yaitu keadaan geografis, keadaan demografis dan keadaan pemerintahan desa.

b. Keadaan Geografis

Desa Pa'nakkukang merupakan salah satu dari delapan (18) desa yang ada di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Desa Pa'nakkukang secara administratif terbagi menjadi 5(Lima) dusun yaitu Dusun Kunjungmange, Dusun Pajalau, Dusun Bontobiraeng, Dusun Parangma'lengu, dan Dusun Bontocinde.

dengan luas wilayah= 389.88 Ha dari luas lahan tersebut dimanfaatkan dalam beberapa kelompok:

NO	Pemanfaatan lahan	
	Pemanfaatan	Luas Ha
1	Jalan	10 km
2	Persawahan	226,8 Ha
3	Pemukiman	48,30 Ha
4	Pekarangan	11,82 Ha
5	Perladangan	17,87 Ha
6	Perkantoran	0,15 Ha
7	Irigasi Teknis	208,93 Ha
8	Tanah Wakaf	2,50 Ha

Sumber Data: Profil Desa Pa'nakkukang

Letak Desa Pa'nakkukang adalah merupakan salah satu yang terletak dibagian Selatan Kecamatan Pallangga yang :

- Jarak ibu kota Kecamatan : 5 Km
- Waktu Tempu : 15 Menit
- Jarak Ibu Kota Kabupaten : 6 km
- Waktu Tempuh : 1 jam
- Jarak Ibu Kota Provinsi : 15 km
- Waktu Tempuh : ½ Jam

Adapun batas-batas wilayah desa Pa'nakkukang adalah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Pallangga.

- ❖ Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Julukanaya
- ❖ Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Bontosunggu
- ❖ Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Panciro

c. Topografi Desa

Kondisi topografi Desa Pa'nakkukang adalah Termasuk daerah dataran rendah dengan ketinggian 20 m s/d 25 m di atas permukaan laut (dpl), Kemiringan 4^0-9^0 , dan berada pada posisi $12^0\ 33''19''$ Bujur timur dan $5^0\ 34''13''$ lintang selatan.

Kondisi tanah di desa Pa'nakkukang terdiri atas 3 jenis yaitu tanah bertekstur batuan dan berwarna merah yang terletak di ujung selatan Dusun Watu-watu yang berbatasan langsung dengan desa Paraikatte Kec. Bajeng, Wilayah ini merupakan wilayah bukit sekitar 15 Ha dengan kedalaman solum sekitar 0 cm-30 cm, Kedua tanah berwarna coklat Keputihan , Liat dan Gembur yang merupakan tanah pada persawahan yang masih subur dengan solum yang dalam. Ketiga tanah berwarna hitam berstektur agak berpasir, tanah ini sebagian besar merupaan tanah pada wilayah ladang sekitar 28 Ha dengan solum yang dalam. Pada tanah berwarna hitam tersebut cocok untuk tanaman jangka panjang dan jangka pendek.

d. Iklim dan curah Hujan

Secara Umum Desa pa'nakkukang beriklim tropis dimana suhu udara mencapai rata-rata $25^0\text{C}-30^0\text{C}$ sepanjang tahun dan memiliki dua tipe musim yaitu musim hujan dan musim kemarau antara bulan Mei sampai bulan September. Curah

hujan mencapai Rata-rata 2000 mm-3000 mm pertahun dan tertinggi terjadi pada bulan Desember, Januari dan Februari.

e. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

No	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kunjung mange	505	545	1050
2.	Pajalau	474	472	946
3.	Bontobiraeng	527	551	1.078
4.	Parangma'lengu	386	424	810
5.	Bontocinde	758	760	1.518
		2.650	2.752	5.402

Sumber data: profil Desa Pa'nakkukang Tahun 2015

f. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Pa'nakkukang

Visi Misi Desa Pa'nakkukang

- Visi

Terwujudnya desa pa'nakkukang yang sejahtera berbasis pertanian ekonomi kerakyatan.

- Misi

1. Meningkatkan hasil pertanian melalui pengembangan sumber daya.
2. Mengembangkan home industri
3. Meningkatkan infrastruktur pedesaan.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan desa
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik

Desa Pa'nakkukang dibentuk sejak tanggal 29 September 1989 yang merupakan pemekaran dari desa Tinggimae. Kemudian Desa pa'nakkukang menjadi

desa Defenitif pada tahun 1992. Sejak itu terbentuknya Desa Pa'nakkukang sudah beberapa kali dipimpin oleh Kepala Desa terpilih Sebagai berikut:

- Kepala Desa pertama = H. ABD RAHMAN DG TUPPU (1989-1996)
- Kepala Desa Kedua = DRS.HERTASNING DG KALU (1996-2003)
- Kepala Desa ketiga = DRS.HERTASNING DG KALU (2003-2008)
- Kepala Desa keempat= ABD MALIK DG GASSING, BS (2008-2014)
- Kepala Desa Kelima = SAIPUDDIN DG NOMPO, S.SOS (SEKARANG)

g. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pa'nakkukang

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Jalannya pemerintah desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa diawasi oleh BPD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, persyaratan menjadi anggota BPD adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan beberapa persyaratan yang mengikat, penetapan jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah, dan kemampuan keuangan desa yang bersangkutan. Jumlah anggota BPD di Desa Pa'nakkukang sebanyak 9 (sembilan) orang: yang terdiri atas :

1. Ketua BPD : 1 orang
2. Wakil Ketua BPD : 1 orang
3. Sekretaris : 1 orang

4. Anggota : 6 orang

Adapun struktur pengurus BPD desa Pa'nakkukang dapat dilihat dalam tabel.

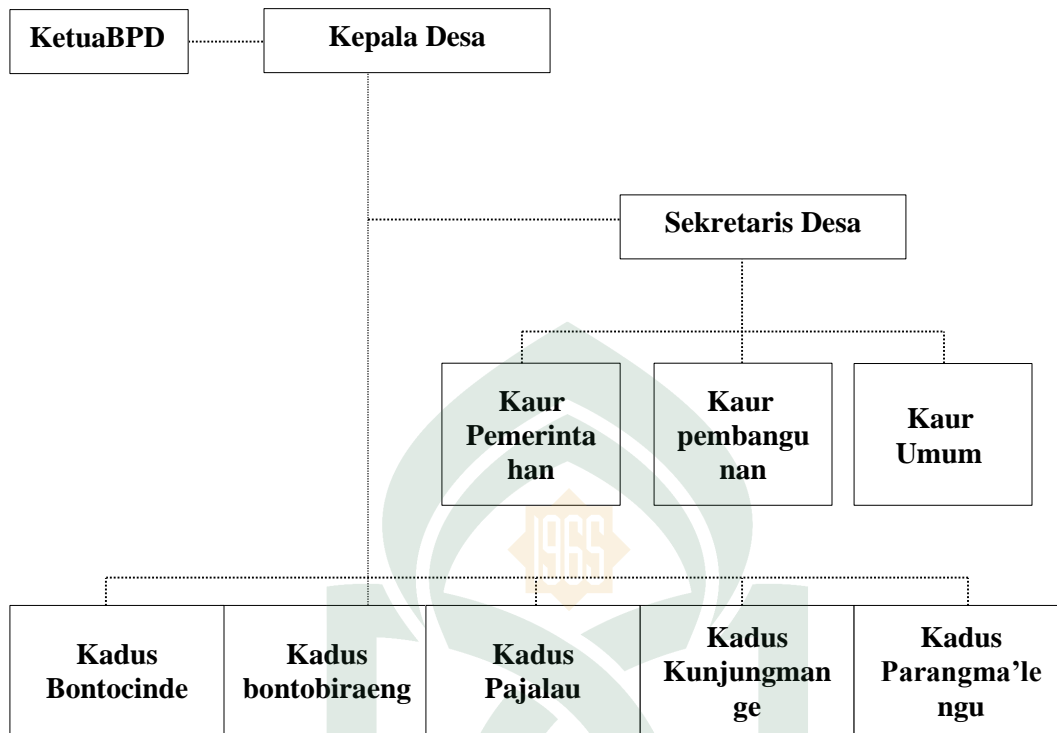
NO	NAMA	JABATAN
1.	Saharuddin dg rala	Ketua
2.	Hafid tarru	Wakil Ketua
3.	Ridwan raja, SH	Sekretaris
4.	Parawansa Dg rupa	Anggota
5.	Rajaman Sijaya, SP	Anggota
6.	Sabaruddin dg Ngewa	Anggota
7.	Ahmad taba	Anggota
8.	Syamsuddin Dg patau	Anggota
9.	Nur intang	Anggota

Sumber Data: Struktur Organisasi BPD desa pa'nakkukang.

h. Pemerintah Desa

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Struktur organisasi pemerintahan Desa Pa'nakkukang, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dapat dilihat dalam bagan:



Sumber: Bagan struktur organisasi pemerintahan Desa pa'nakkukang.

B. Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Pa'nakkukang, Kecamatan Pallangga, gowa.

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah desa. Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa

Mengingat pentingnya kedudukan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dalam penyusunan peraturan desa tersebut harus didasarkan

kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat, mengacu pada peraturan perundang-undangan desa, dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum.¹

Dalam pemerintahan desa, BPD sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Pengertian sejajar disini adalah bahwa kedudukan BPD tidak lebih rendah dan tidak juga lebih tinggi. seperti yang diungkapkan oleh Saipuddin, selaku Kepala Desa Pa'nakkukang, beliau mengatakan bahwa:

“ BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa, dalam melaksanakan fungsinya, BPD dan pemerintah desa sudah saling menghormati, bantu membantu, dan selalu bersama sama dalam membuat peraturan desa ”.²

Tidak jauh berbeda dari apa yang di katakan oleh Kepala Desa pa'nakkukang, terkait dengan pertanyaan yang serupa, Menurut Bapak Saharuddin Dg Rala selaku ketua BPD, beliau mengatakan bahwa :

“BPD selalu bersama sama dengan pemerintah desa dalam menetapkan peraturan desa, karna antara BPD dan pemerintah desa merupakan mitra dalam pemerintahan desa”.³

BPD dalam merumuskan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut :

¹Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet: Ke 3. (Malang, Setara press, 2014), h.56

² Saipuddin (46 Tahun), Kepala Desa Pa'nakkukang, *Wawancara*, Gowa, 22 Januari 2016

³Saharuddin Dg Rala (50 Tahun), Ketua BPD Pa'nakkukang, *Wawancara*, Gowa 23 Januari 2016

- a. Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.
- b. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.
- d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.
- e. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Fungsi legislasi yang dilakukan oleh BPD Pa'nakkukang mengacu kepada peraturan yang ada. bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa serta BPD berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Bersama dengan Kepala Desa. Berikut wawancara dengan sekretaris BPD

“ BPD dalam menjalankan fungsi legislasinya telah merumuskan dan menetapkan peraturan desa. Sampai saat ini telah tercatat 2 Keputusan yang telah dihasilkan oleh BPD Desa Pa'nakkukang. Ada beberapa peraturan desa dan Keputusan BPD yang lain telah dihasilkan diantaranya adalah tentang APBDes, Keputusan Pertanggungjawaban Kepala Desa. Peraturan Kepala Desa ini diketahui dan disetujui oleh BPD untuk bisa dipertanggungjawabkan ”⁴

⁴Ridwan Raja (45 Tahun), Sekretaris BPD, *Wawancara* , Gowa 23 Januari 2016

Berikut hasil wawancara dengan salah satu Tokoh Masyarakat Desa Pa'nakkukang :

“ Dalam Proses pembuatan peraturan desa, APBDes atau apa, kami selalu dilibatkan, kalau tidak salah ada 2 peraturan desa Pa'nakkukang, yang telah dibuat oleh pemerintah desa dan BPD ”.⁵

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Pa'nakkukang, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, kedudukan BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa sudah terwujud dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, yaitu menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa.

Pernyataan tersebut juga hampir sama dengan pernyataan Kepala Desa Pa'nakkukang, fungsi legislasi ini dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi BPD dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa. Proses yang dilakukan BPD dan Kepala Desa di dalam menetapkan Peraturan Desa berdasarkan wawancara dengan Saharuddin Rala selaku Ketua BPD Pa'nakkukang, adalah sebagai berikut:

“ Dalam merumuskan Perdes, BPD menampung aspirasi dari masyarakat desa seperti usulan-usulan masyarakat tentang pembangunan jalan, pembangunan jembatan, Pembangunan Drinase, Jalan tani, pemakaman umum, kemudian menyampaikannya pada pihak pemerintah desa yang diwakili oleh Saipuddin selaku Kepala Desa. Dan kemudian di proses oleh pihak pemerintah desa sebelum ditetapkan bersama-sama BPD ”.⁶

⁵Sukrin Dg Nomp (47 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara* , Gowa 24 Januari 2016

⁶Saharuddin Dg Rala (50 Tahun), Ketua BPD Pa'nakkukang, *Wawancara*, Gowa 23 Januari

Adapun tahap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) secara lebih Detail Runtutan proses kegiatan dalam penyusunan RPJMDes Desa Pa'nakkukang sebagai berikut :

a. Musyawarah Dusun/ Penjaringan Masalah dan Potensi.

Proses penjaringan masalah dilakukan oleh Tim Perencanaan Partisipatif yang terdiri dari LKMD, Tokoh Masyarakat, relawan dan Unsur Pemerintah Desa serta BPD. Dalam konteks ini, tim Perencanaan Partisipatif bertanggung jawab secara institusional kepada LKMD, dan kepada publik lewat mekanisme Lokakarya Desa. Untuk menggali data potensi dan masalah yang ada di Desa, Tim Perencanaan Partisipasi menggunakan tiga alat dengan metode PRA sebagai berikut : Sketsa Desa, Kalender Musim, diagram kelembagaan, Anggota Rumah Tangga Miskin (A-RTM) Pra Sejahtera dan Sejahtera. Proses penjaringan masalah dan potensi ini dilakukan dalam pertemuan dusun (Musyawarah Dusun) yang dihadiri oleh Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan serta masyarakat dari dusun tersebut.

b. Musyawarah Perencanaan Partisipatif Tingkat Desa.

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam Musrenbang di Tingkat Desa dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengelompokkan masalah-masalah dari hasil musyawarah Dusun.
2. Menyusun Sejarah Desa
3. Menyusun Visi Misi Desa

4. Membuat skala prioritas, pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan skala prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun tehnik yang digunakan adalah dengan menggunakan ranking dan pembobotan.
5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah, setelah semua masalah diranking berdasarkan criteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternative tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dengan potensi yang ada.
6. Menetapkan rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana Pembangunan Skala Desa dan Pembangunan Skala Kabupaten. Hasil yang dicapai dalam lokakarya ini adalah tersusunnya draf RPJMDes.

c. Musrenbang Desa-Pembahasan Draf RPJMDes

Pada tahap selanjutnya dari Lokakarya Perencanaan Partisipatif oleh Tim Perencanaan Partisipatif hasil yang dicapai masih berupa draf Dokumen RPJMDes, yang oleh LKMD kemudian dikonsultasikan kepada publik melalui MUSRENBANG Desa untuk mendapatkan tanggapan/masukan dari masyarakat serta narasumber, usulan atau masukan dari masyarakat yang disetujui oleh forum akan ditambahkan dalam Dokumen RPJMDes.

d. Pengesahan RPJMDes

Draf RPJMDes yang sudah direvisi kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD menjadi Peraturan Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pa'nakkukang.

e. Sosialisasi RPJMDesa

Sosialisasi RPJMDesa dilakukan di tiap dusun melalui pertemuan-pertemuan rutin serta ditempelkan di papan informasi yang ada, baik papan informasi Dusun dan Desa. Dalam menjalankan tugasnya, BPD dan pemerintah desa Pa'nakkukang telah mengeluarkan 2 (dua) peraturan desa yaitu Peraturan Desa Pa'nakkukang No.1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2015, dan Peraturan Desa Pa'nakkukang No. 001 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2011-2015.

Pada pembuatan APBDes, pemerintah desa mengundang BPD dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan masukan mengenai materi yang akan dimasukkan dalam RAPBDes. RAPBDes yang telah disusun oleh pemerintah dan dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian diserahkan kepada BPD untuk disetujui. Hal ini sesuai dengan apa yang di utarakan oleh bapak Jumaris Dg Nappa salah seorang tokoh masyarakat di Desa pa'nakkukang yang mengatakan:

“ Dalam pembuatan peraturan desa, pemerintah desa dan juga BPD selalu melibatkan kami, untuk turut berpartisipasi dalam kebijakan-kebijakan yang akan di keluarkan ”.⁷

⁷Jumaris dg Nappa (42 Tahun), Tokoh Masyarakat. *Wawancara*, 24 Januari 2016

Begitupun dengan apa yang di sampaikan oleh bapak Nurdin Dg Nassa selaku Ketua RK 2 parangma'lengu, tidak jauh berbeda dari yang di sampaikan oleh bapak Jumaris Dg Nappa, beliau mengatakan bahwasanya:

“ Dalam merumuskan peraturan desa, pemerintah desa dan BPD selalu melibatkan tokoh masyarakat, Kepala Dusun, ketua RK, RW, Pemuka agama, tokoh pemuda dan unsur-unsur lain untuk turut andil dalam menentukan arah pembangunan di Desa pa'nakkukang yang di laksanakan oleh pemerintah Desa” .⁸

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dan Permendagri RI No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, memberi amanah kepada pemerintah desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri. Forum perencanaannya disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai.

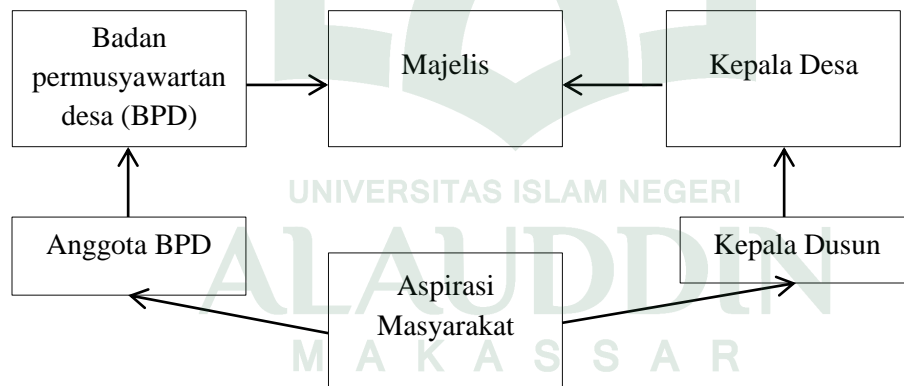
Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari Tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan Desa telah dilaksanakan dengan baik dan juga melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa seluruh komponen yang ada di desa pa'nakkukang telah ikut berpartisipasi dalam rangka kemajuan desa.

⁸Nurdin Dg Nassa (44 Tahun), Ketua RK, Wawancara , Gowa, 26 Januari 2016

2. fungsi untuk menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

Salah satu bentuk tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa merupakan tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait yaitu pemerintah desa. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan dan peranan BPD.⁹

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPD dengan Kepala Desa dalam kaitannya dengan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dapat digambarkan dalam skema berikut ini :



Suatu aspirasi masyarakat dapat diajukan melalui Kepala Dusun kemudian Kepala Dusun akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Kepala Desa tentang suatu hal. Aspirasi yang sudah diterima oleh Kepala Desa selanjutnya disampaikan

⁹M. Firman Hadi, *Hubungan Fungsional Antara Pemerintah Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram. h. 13

kepada BPD untuk dibahas dalam suatu rapat mejelis guna mendapatkan kesepakatan untuk dilaksanakan.

Selanjutnya suatu aspirasi yang berasal dari masyarakat dapat disampaikan melalui anggota BPD, anggota BPD tersebut menyampaikannya kepada Ketua BPD untuk mengadakan rapat pembahasan dengan mengundang Pemerintah desa (Kepala desa) dan/atau perangkatnya dalam suatu rapat mejelis untuk selanjutnya mendapatkan suatu kesepakatan untuk dilaksanakannya aspirasi tersebut.¹⁰

Berbicara masalah fungsi keterwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa yang mana tertuang dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan fokus penelitian yang dilakukan peneliti di desa pa'nakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, peran Badan Permusyawaratan Desa sangat berpengaruh sebagai wadah aspirasi dari masyarakat setempat.

Menurut Ahmad Dg Taba selaku anggota BPD, beliau mengatakan bahwa :

“ BPD selalu menampung aspirasi dari masyarakat dan kemudian aspirasi tersebut disalurkan ke pemerintah desa, dan BPD selalu menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat melalui pengajian, kumpulan RT, kumpulan RW, dan menurut saya sarana yang paling efektif adalah kumpulan RT dan pengajian ”¹¹

Hal senada Juga di sampaikan oleh Sekretaris BPD yaitu Ridwan Dg Raja, beliau mengatakan Bahwa:

“ Dalam membuat peraturan desa sudah berjalan secara demokratis dengan memberi ruang terhadap aspirasi masyarakat, BPD selalu menyerap aspirasi dari masyarakat, setelah itu dikumpulkan dan dikaji membuat prioritas terhadap

¹⁰M. Firman Hadi, *Hubungan Fungsional Antara Pemerintah Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram., h. 10

¹¹ Ahmad Dg Taba (52 Tahun), Anggota BPD, *Wawancara*, Gowa, 23 Januari 2016

aspirasi dan merumuskan menjadi rancangan Perdes bersama Kepala Desa, setelah itu ada dialog bersama biasanya lewat kumpulan RT atau pengajian sehingga masyarakat bisa mencermati, mengkritisi, memberi masukan setelah ada masukan rancangan peraturan desa dan pemerintahan desa wajib merevisi raperdes berdasarkan masukan dari masyarakat, setelah direvisi Raperdes tersebut dijadikan Perdes setelah itu disosialisasikan kepada warga, agar masyarakat siap menjalankan Perdes tersebut ” .¹²

Aspirasi-aspirasi yang diserap dari masyarakat oleh BPD dilakukan melalui mekanisme atau cara ;

Penyampaian langsung kepada BPD

“ Penyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD tidak jarang pula dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada anggota BPD yang ada di lingkungannya (RW) ” .¹³

Penyampaian melalui Tokoh Masyarakat dan tokoh agama, seperti apa yang di ungkapkan oleh salah satu anggota BPD yaitu Bapak Parawansa Dg Ruppia:

“ BPD memperhatikan aspirasi dari masyarakat melalui Tokoh Masyarakat yang ada di Dusun, karena banyak juga aspirasi masyarakat yang di sampaikan oleh masyarakat bukan langsung kepada anggota BPD, melainkan kepada Tokoh masyarakat dan tokoh agama, seperti halnya tokoh masyarakat yang ada di dusun parangma'lengu seperti bapak H. Abd Kadir dg kulle, dan bapak Hayanuddin Dg Bali. Dan kemudian beliau lah yang menyampaikannya kepada saya. Ini mungkin saya sadari bahwa kurang taunya masyarakat mengenai tugas saya sebagai BPD ” .¹⁴

Menurut hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis, berdasarkan informasi dari beberapa informan juga mendapatkan informasi, bahwa masih ada beberapa warga masyarakat belum mengetahui tugas dan wewenang dari BPD. Seperti hasil wawancara yang di lakukan peneliti kepada warga masyarakat di Desa Pa'nakkukang,

¹²Ridwan Dg Raja (45 Tahun), Sekretaris BPD, Wawancara , Gowa 23 Januari 2016

¹³Ahmad Dg Taba (52 Tahun), Anggota BPD, Wawancara, Gowa, 23 Januari 2016

¹⁴Parawansa Dg Ruppia (52 Tahun), Anggota BPD, Wawancara, Gowa 24 Januari 2016

khususnya di RK 1 dan RK 2 Dusun Parangma'lengu terkait pengetahuan masyarakat mengenai tugas dan fungsi BPD. Wawancara Dengan Ibu Mustaina Dg Ti'no, Beliau mengatakan bahwa:

“ saya tidak tahu tugas dan fungsinya BPD, kita biasa di sini kalau ada masalah langsung pak H. Abd Kadir Dg Kulle yang di tanya sebagai salah satu pemuka agama di kampung sini ”.¹⁵

Pendapat senada di sampaikan oleh Bapak Rahman Dg Sijaya yang mengatakan:

“ Kalau di kampung sini saya tahu siapa yang menjadi anggota BPDnya, tapi masalahnya tidak saya tau apa tugasnya itu BPD, karna tidak pernah juga mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsinya. Jadi biasanya orang-orang di sini kalau ada aspirasi yang mau dia sampaikan itu ke pak RK atau ke pak Dusun ”.¹⁶

Pendapat yang hampir sama pula di sampaikan oleh saudara Nursyam selaku warga masyarakat, tidak berbeda jauh dengan yang di sampaikan Ibu Mustaina Dg Ti'no, dan Bapak Rahman Dg Sijaya, Beliau mengatakan:

“ saya tidak tahu tugasnya BPD dalam pemerintahan di desa ini, lagian ada pak Imam Desa atau pak Dusun di sini yang bisa di tanya kalau ada aspirasinya masyarakat dalam hal pembangunan desa ”.¹⁷

Dari hasil penelitian ini menunjukkan masih ada Beberapa warga masyarakat yang kurang mengetahui tugas pokok dan fungsi BPD dalam pemerintahan desa, sehingga jika ada aspirasi dari masyarakat hanya di sampaikan kepada tokoh masyarakat yang ada di setiap Dusun, dan tokoh masyarakat tersebut yang menyampaikannya kepada anggota BPD yang ada di dusunya masing-masing, dan

¹⁵Mustaina Dg Ti'no(48 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Gowa 26 Januari 2016

¹⁶Rahman Dg Sijaya (45 Tahun), Petani. *Wawancara*, Gowa 26 Januari 2016

¹⁷Nursyam (30 Tahun), Buruh Bangunan, *Wawancara*, Gowa 26 Januari 2016

selanjutnya BPD yang memberitahukan langsung kepada Pemerintah Desa. Hal ini sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh salah satu pemuka agama yaitu Imam Desa Pa'nakkukang yang berkedianan di salah satu dusun yang terdapat di Desa Pa'nakkukang yaitu Dusun Parangma'lengu, hasil wawancara dengan Bapak H. Abd

Kadir Dg Kulle mengatakan:

“ Iya betul, biasanya Masyarakat disini kalau ada aspirasi yang mau di sampaikan itu ke saya, lalu saya yang sampaikan kepada anggota BPD yang ada di dusun ini, atau biasa juga saya sampaikan ke Pak Dusun, atau langsung saya sampaikan ke pemerintah desa dalam hal ini pak kades. Hal ini mungkin karena kurang taunya masyarakat mengenai tugas dari BPD yaitu untuk menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat ”.¹⁸

Hal yang hampir sama juga di sampaikan oleh bapak Kepala Dusun Parangma'lengu, yang mengatakan:

“ Banyak warga saya yang kurang begitu mengetahui tugas dan wewenang dari BPD yang ada di dusun parangma'lengu ini, mungkin karena kurangnya sosialisasi juga kepada masyarakat terkait tugas dan peranya dalam pemerintahan desa, sehingga warga saya di sini, jika ada aspirasi yang mau mereka sampaikan, mereka menyampaikanya langsung ke saya, karna saya sebagai bawahan dari bapak Kepala Desa, yang bisa menindak lanjuti aspirasi mereka ke pemerintah desa ”.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan apa yang penulis dapatkan di lapangan, terkait implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah aspirasi masyarakat desa Pa'nakkukang belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan. Fungsi menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlalu efektif, sesuai apa yang di dapatkan

¹⁸H.Abd Kadir Dg Kulle (54 Tahun), Imam Desa Pa'nakkukang. *Wawancara*, Gowa, 25 Januari 2016

¹⁹Abd Hakim Dg Sanre (56 Tahun), Kepala Dusun Parangma'lengu, *Wawancara*, Gowa, 27 Januari 2016

peneliti di lapangan bahwa, memang masih ada beberapa warga masyarakat di Desa pa'nakkukang Kurang begitu mengetahui tugas dan wewenang dari BPD itu sendiri, karna kurangnya sosialisasi dari BPD kepada Masyarakat berkenaan dengan tugas dan fungsinya, di luar dari tokoh masyarakat yang ada di setiap Dusun.

3. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.²⁰

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa Pa'nakkukang yang dipimpin Kepala Desa merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sejauh ini, BPD desa pa'nakkukang konsisten dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan,

²⁰Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet: Ke 3. (Malang, Setara press, 2014), h. 79

peraturan, dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan bapak Kepala Desa Pa'nakkukang, beliau mengatakan:

“ Setiap kegiatan dari pemerintah desa selalu diawasi oleh BPD, jadi setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain BPD selalu di libatkan ”.²¹

Selaras dengan apa yang di katakan Pak Saipuddin selaku Kepala Desa, pendapat dari ketua BPD Pa'nakkukang yaitu Saharuddin Dg Rala, beliau menyatakan:

“ Kami selalu mengawasi jalannya pemerintahan desa, baik yang berhubungan dengan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat. Itu semua di awasi oleh BPD agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang di lakukan oleh pihak pemerintah desa, contohnya juga jika ada pembangunan fisik seperti pembangunan drainase, dll. biasanya BPD turun untuk meninjau langsung pembangunan tersebut ”.²²

Berjalannya fungsi pengawasan ditunjukkan telah diterimanya laporan pertanggungjawaban Kepala Desa oleh BPD. Dalam wawancara dengan Saipuddin selaku Kepala Desa Pa'nakkukang, beliau menyatakan bahwa :

“ Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Desa diterima setelah sebelumnya diadakan pandangan atau tanggapan terhadap materi laporan, dalam pandangan atau tanggapan terhadap laporan pertanggung jawaban Kepala Desa ini, juga disampaikan saran-saran BPD kepada Kepala Desa ”.²³

Hal ini di benarkan oleh ketua BPD desa pa'nakkukang dari hasil wawancara yang mengatakan:

²¹Saipuddin (46 Tahun), Kepala Desa Pa'nakkukang, *Wawancara*. Gowa, 22 Januari 2016

²²Saharuddin Dg Rala (50 Tahun), Ketua BPD Pa'nakkukang. *Wawancara*, Gowa 23 Januari 2016

²³Saipuddin (46 Tahun), Kepala Desa pa'nakkukang. *Wawancara*, Gowa 25 Januari 2016

“ Laporan pertanggung jawaban kepala desa kepada BPD selalu di sampaikan. Dan tetap mengundang tokoh masyarakat, RK, RW, tokoh agama, tokoh pemuda sebagai perwakilan masyarakat setempat dan hasil dari pertanggung jawaban tersebut yang di sampaikan tokoh masyarakat atau Kepala Dusun kepada warga masyarakat di setiap dusun ” .²⁴

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengamankan, bahwa dalam melaksanakan tugas , kewenangan, hak dan kewajiban, Kepala Desa wajib:

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
 2. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
 3. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.²⁵
1. Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Pa'nakkukang terhadap pelaksanaan peraturan desa, antara lain :
 - a. Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pelaksana peraturan desa.
 - b. Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan. BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD.

²⁴Saharuddin dg Rala (50 Tahun), Ketua BPD Pa'nakkukang. *Wawancara*, Gowa 26 Januari 2016

²⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab V, Pasal*
27

- c. Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati untuk ditindaklanjuti.

2. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Seperti apa yang di katakan oleh Bapak Ahmad Dg Taba, selaku anggota BPD pa'nakkukang:

“Untuk saat ini di Desa Pa'nakkukang alokasi anggaran dana masih tepat sasaran, dan belum ada penyelewengan yang di lakukan oleh pihak pemerintah desa dalam hal ini pak Saipuddin selaku Kepala Desa Pa'nakkukang”²⁶

Pendapat yang hampir sama yang di sampaikan oleh anggota BPD yang lain, Parawansa Dg Ruppa yang mengatakan:

“jalannya pemerintahan desa yang di laksanakan pemerintah desa, untuk saat ini masih berjalan sesuai dengan semestinya”.²⁷

Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu :

1. Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.
2. Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa.
3. Memantau secara langsung ke lapangan pada saat proses pembangunan fisik yang ada di desa.

²⁶Ahmad Dg Taba (52 Tahun), Anggota BPD, *Wawancara*, Gowa, 23 Januari 2016

²⁷Parawansa DG Ruppa (52 Tahun), Anggota BPD, *Wawancara*, Gowa 24 Januari 2016

Hal ini selaras dengan pernyataan salah satu Tokoh masyarakat yaitu bapak Jumaris Dg Nappa, yang mengatakan bahwa:

“ Yang saya lihat terkait salah satu bentuk pengawasan yang di lakukan oleh anggota BPD itu, mereka biasanya langsung turun meninjau proses pembangunan yang sedang di laksanakan, contohnya seperti ketika ada pengerjaan Drinase, pengerjaan tanggul sungai, saluran Irigasi, anggota BPD tersebut langsung turun untuk meninjau pengerjaanya”.²⁸

Tidak jauh berbeda dari apa yang di kemukakan oleh Bapak Jumaris dg Nappa selaku salah satu tokoh masyarakat di desa pa'nakkukang, pendapat dari Bapak Hayanuddin Dg Bali selaku salah satu pemuka agama mengatakan:

“ Pelaksanaan salah satu fungsi BPD yaitu mengawasi jalannya peraturan desa, menurut saya sudah cukup baik di tandai dengan rutinnya anggota BPD meninjau secara langsung jika ada pengerjaan pembangunan fisik di desa, dan juga terkait pengawasan administratif seperti lembar pertanggung jawaban pemerintah desa yang setiap akhir tahun anggaran di sampaikan kepada BPD, kami juga selalu di libatkan “ .²⁹

Terkait efektivitas pengawasan BPD dalam mengawasi jalannya peraturan desa, dibutuhkan juga partisipasi dan kerja sama dari masyarakat. Dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan partisipasi masyarakat adalah satu hal yang penting. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat masyarakat sebagai objek semata.

Namun hasil penelitian penulis berdasarkan informasi dari beberapa informan dan pengamatan di lapangan menunjukkan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan pemerintahan sangat rendah., contohnya pengawasan dalam hal ADD di

²⁸Jumaris Dg Nappa (42 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 24 Januari 2016

²⁹Hayanuddin Dg Bali (56 Tahun), Pemuka Agama, *Wawancara*, Gowa, 27 Januari 2016

desa pa'nakkukang, dalam kaitannya dengan pengelolaan ADD, berarti pengawasan itu di maksudkan untuk memastikan pelaksanaan pengelolaan ADD dapat sesuai dengan rencana yang telah disepaki bersama dalam MUSRENBANGDes. Dalam hal ini, istilah pengawasan ini dapat diidentikkan dengan pengertian monitoring atau pemantauan , yaitu suatu pengamatan atau kontrol pelaksanaan kegiatan mulai awal hingga akhir kegiatan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa. Sedangkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan apa yang di ungkapan Kepala Desa Pa'nakkukang , bahwa:

“ pengawasan pengelolaan ADD ini di laksanakan oleh pihak kecamatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, bagian Pemerintahan Desa termasuk Badan Permusyawaratan Desa, dan inspektorat, yang teknis pelaksanaanya, pengelola ADD tingkat desa (Kepala Desa, PTPKD, Bendahara Desa) dikumpulkan di Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan mengenai pembukuan, dan sekaligus dimintai keterangan mengenai proses pelaksanaan pengelolaan ADD tersebut”³⁰

Pernyataan Kepala Desa tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pengelolaan ADD dilaksanakan secara hirarkhis struktural, yaitu pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawas atau satuan organisasi pemerintah yang menyelenggarakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar pelaksanaan tidak menyimpang dari rencana yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu masyarakat pun tidak ada yang mengorganisir diri untuk menjadi pengawas pelaksanaan pengelolaan dana ADD, baik secara individu maupun

³⁰Saipuddin (46 Tahun), Kepala Desa pa'nakkukang. *Wawancara*, Gowa 25 Januari 2016

kelompok, dan juga tidak ada pihak lain yang memfasilitasi pengorganisasian masyarakat untuk melakukan pengawasan pengelolaan dana ADD.. Abdul Haris Dg Ngerang selaku salah satu tokoh masyarakat mengungkapkan, bahwa:

“masyarakat tidak banyak yang tau mengenai apa itu ADD, sebab masyarakat juga kurang begitu aktif dalam berpartisipasi dalam melakukan pengawasan, kalau yang saya liat warga desa pa’nakkukang partisipasi mereka baru muncul ketika di gerakkan (dimobilisasi) oleh aparat pemerintah desa, Kepala Dusun, Ketua RW, dan para Ketua RT.³¹

Pendapat Bapak Abdul Haris Dg Ngerang tersebut di kuatkan oleh Bapak Abdul Hakim Dg Sanre, selaku Kepala Dusun Parangma’lengu yang mengungkapkan, bahwa:

“dalam kaitanya dengan pengawasan pengelolaan ADD memang tidak ada keterlibatan masyarakat, dan memang banyak juga warga yang tidak mau ambil pusing mengenai jalannya pemerintahan, apa lagi untuk berpartisipasi dalam pengawasan pengalokasian dana desa. Kalau ada masyarakat yang mengetahui tentang pengelolaan ADD, berarti masyarakat tersebut bersikap pro-aktif terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa”³²

Dari keterangan yang di sampaikan oleh Bapak Abdul Haris Dg Ngerang dan Bapak Abdul Hakim Dg Sanre selaku Kepala Dusun Parangma’lengu memberikan gambaran proses dan hasil pengelolaan ADD tersebut menunjukkan , bahwa proses pengawasan oleh masyarakat terhadap pengelolaan dana ADD kurang terlihat dan nyaris tidak ada, bahwa warga masyarakat banyak yang tidak mengerti dan

³¹Abdul Haris Dg Ngerang, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Gowa, 26 Januari 2016

³²Abd Hakim Dg Sanre (56 Tahun), Kepala Dusun Parangma’lengu, *Wawancara*, Gowa, 27 Januari 2016

memahami apa itu ADD. Mungkin salah satu faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat adalah tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah di desa Pa'nakkukang, dengan demikian dapat di tarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahapan pengawasan ini nyaris tidak ada karna di asumsikan bahwa partisipasi masyarakat tersebut sudah terwakili oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Dari hasil penelitian penulis dapat di simpulkan bahwa terkait dengan fungsi pengawasan dari BPD terhadap jalannya pemerintahan desa yang di laksanakan pemerintah desa sudah cukup baik, dan pemerintah desa pun saat ini masih menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah di atur. Hal tersebut di buktikan, BPD desa pa'nakkukang belum pernah memberi laporan kepada Bupati perihal penyelewengan yang dilakukan Kepala Desa yang saat ini dijabat oleh Saipuddin. S.Sos. Akan tetapi dalam hal pengawasan yang di lakukan masyarakat masih kurang terhadap jalannya pemerintahan yang di laksanakan pemerintah desa, khususnya pengawasan jalannya peraturan desa.

C. Faktor Yang Menjadi Kendala Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Hubungan Pemerintahan Di Desa Pa'nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa.

a. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dan pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan desa. Besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu perdes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan pemerintah desa menjadi mudah untuk dilaksanakan. Cuma sayang, sumber daya manusia dari penduduk desa pa'nakkukang yang masih kurang, hal ini terlihat dari tingkat pendidikan masyarakat di desa pa'nakkukang ini masih relatif rendah. Berdasarkan data dari profil desa tahun 2015 menunjukkan, bahwa tingkat pendidikan masyarakat mayoritas masih berpendidikan dasar, yaitu: 36,37% berpendidikan SD, 32,57% berpendidikan SLTP. Masyarakat yang berpendidikan tingkat SLTA hanya mencapai 30,32%, Diploma 0,56%, dan S1 0,19%.³³ Karna itu sangat wajar jika daya kritis masyarakat relatif rendah, dan cenderung menfigurkan tokoh masyarakat sebagai panutan mereka untuk berpendapat atau bertindak.

³³ Data tingkat pendidikan penduduk, dari profil Desa Pa'nakkukang.

Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah membuat masyarakat yang ada di desa pa'nakkukang cenderung tidak peduli akan hak partisipasinya dalam pemerintahan desa dan enggan terlibat dalam mempengaruhi kebijakan publik. Rendahnya kesadaran ini berdampak pula terhadap keengganan masyarakat untuk terlibat dalam organisasi lokal yang bertujuan untuk memperjuangkan aspirasinya dengan mempengaruhi sebuah kebijakan. Kondisi ini di sebabkan oleh rendahnya pendidikan politik masyarakat. Karna itu, dalam hal urusan pemerintahan dan pembangunan desa, mereka cenderung memfigurkan tokoh masyarakat yang dipandang bisa mewakili dan menyalurkan aspirasinya dalam bersikap dan bertindak. Sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh salah satu tokoh masyarakat yaitu Abd Haris Dg Ngerang:

“ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa harus mampu memahami kondisi-kondisi yang ada di masyarakat. Masyarakat terkadang mampu menjadi pendukung ataupun penghambat. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan ataupun sumber daya masyarakat (SDM) masyarakat berbeda, oleh karena itu dibutuhkan inovasi dari BPD dan pemerintah desa agar semua kegiatan-kegiatannya dapat terealisasi dan diterima dengan baik oleh masyarakat ”.³⁴

b. Tingkat pendidikan anggota BPD

Untuk pelaksanaan fungsi Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat yang selanjutnya di koordinasikan dengan pemerintah desa. Permasalahan tingkat kualifikasi pendidikan

³⁴Abd Haris Dg Ngerang (43 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 24 Januari 2016

sangat menunjang pelaksanaan roda pemerintahan desa, Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh seorang tokoh masyarakat :

“ Kualifikasi pendidikan yang memadai sangat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), namun tingkat pendidikan yang tinggi tidak menjamin berpengaruh mutlak pada pelaksanaan pembangunan desa Pa’nakkukang ” .³⁵

Wawancara dengan sekretaris desa pa’nakkukang

“ Dalam susunan organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD Pa’nakkukang), jika ditinjau dari tingkatan pendidikan, anggota BPD Pa’nakkukang berjumlah 9 orang dengan kualifikasi pendidikan S-1 sebanyak 2 (dua) orang, SMA sebanyak 4 (empat) orang dan SMP sebanyak 3 (tiga) orang ” .³⁶

dari data yang diperoleh dan hasil wawancara dengan informan bahwa tingkat pendidikan pengurus BPD desa Pa’nakkukang masih rendah. Pada hal Stratifikasi atau tingkat pendidikan juga berpengaruh pada keberhasilan penerapan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan tingginya derajat keilmuan yang dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi analisis terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi dalam suatu lingkup masyarakat, dan kenyataannya bahwa tingkat pendidikan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pa’nakkukang masih standar sehingga hal inilah yang menjadi faktor penghambat di dalam menjalankan fungsinya pada pemerintahan desa.

³⁵Jumaris Dg Nappa (42 Tahun), Tokoh Masyarakat. *Wawancara*, Gowa, 24 Januari 2016

³⁶Abd Malik Dg Gassing (50 Tahun), Sekretaris Desa Pa’nakkukang, *Wawancara*, Gowa 27 Januari 2016

Hasil Penelitian di lapangan dan berdasarkan informasi dari beberapa anggota BPD menunjukkan bahwa kurangnya dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah kabupaten Gowa, menyebabkan BPD mengalami kesulitan dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa. menurut pengakuan anggota BPD yaitu Parawansa Dg Ruppia, beliau mengatakan bahwa:

“ Kalau berbicara masalah bimbingan teknis yang dilaksanakan pemerintah kabupaten gowa, seperti pelatihan dan penyuluhan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa itu jarang malah tidak pernah ”³⁷

Hal ini juga yang menjadi kendala dari BPD dalam pemerintahn desa, seperti halnya yang di ungkapkan salah satu anggota BPD yang lain yaitu Ahmad Dg Taba, beliau mengatakan :

“ Menuangkan berbagai hal yang bersangkutan paut dengan persoalan yang akan diatur ke dalam bunyi pasal dalam peraturan desa sering memicu pembicaraan yang sangat lama dalam rapat BPD dan Kepala Desa ”.³⁸

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah kabupaten Gowa, menyebabkan BPD mengalami kesulitan dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa dalam pemerintahan, untuk itu penulis berpendapat pemerintah kabupaten gowa agar dapat lebih sering untuk melakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa kepada BPD dan pemerintah desa.

c. Kerjasama dengan Kepala Desa

³⁷Parawansa Dg Ruppia (52 Tahun), Anggota BPD, Wawancara, Gowa 27 Januari 2016

³⁸Ahmad Dg Taba (52 Tahun), Anggota BPD, Wawancara, Gowa, 23 Januari 2016

Kehadiran Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintah desa dengan sebagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem *chek and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Namun dalam penelitian yang di lakukan penulis menunjukkan bahwa pola hubungan sejajar antara BPD dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, ternyata dalam pelaksanaannya diwarnai oleh praktek-praktek hubungan kerja yang kurang harmonis dan mengarah kepada terjadinya konflik serta menunjukkan kecenderungan terjadinya dominasi Kepala Desa atas BPD, sebagaimana diucapkan oleh anggota BPD bahwa :

“ Pada umumnya hal-hal yang akan menjadi kegiatan pengurus BPD biasanya mendapat tantangan dulu dari Bapak Kades kalau apa yang akan kami lakukan tidak sesuai dengan pendapat dari pak Kades, sehingga segala kegiatan ini akan terhambat hanya karena masalah keinginannya yang harus dilaksanakan sehingga untuk hasil pembuatan peraturan desa pun tidak berdasarkan target yang telah ditentukan ”.³⁹

Berdasarkan pengamatan dan informasi yang penulis dapatkan, bahwa walaupun terjadi hubungan kekerabatan antara pengurus BPD dengan Bapak Kepala Desa, namun tidak seluruh pandangan atau kehendak Bapak Kepala Desa yang menjadi pedoman untuk berkarya, beberapa hal mengakibatkan terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara BPD dengan Kepala Desa , salah satu unsur ketidak harmonisan ini terjadi karena adanya campur tangan BPD dalam proses penyusunan

³⁹Parawansa Dg Rupp (52 Tahun), Anggota BPD, Wawancara, Gowa 27 Januari 2016

dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) yang menjadi dasar (BPD) dalam melaksanakan fungsi kontrolnya terhadap kinerja Kepala Desa, pelaksanaan peraturan desa dan pelaksanaan pertanggung jawaban Kepala Desa.

Permasalahan tarik menarik kepentingan sebagai salah satu faktor penghambat dalam mengukur tingkat efektifitas fungsi BPD, hal ini didasari atas informasi yang diberikan Kepala Desa :

“Dalam implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kondisi tarik menarik kepentingan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa menjadi hal yang lumrah. Hal ini disebabkan karena adanya keinginan untuk memberikan suatu yang terbaik bagi penyelenggaraan pemerintah desa “⁴⁰

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa mempunyai kedudukan yang setara, karena keduanya sama-sama dipilih oleh anggota masyarakat desa setempat, tetapi kalau dilihat dari proses pemberhentian, terkesan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati. Sementara Kepala Desa tidak lebih daripada itu, dalam proses penetapan perangkat desa, Kepala Desa harus meminta persetujuan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, demikian kedua belah pihak tidak saling menjatuhkan karena sama-sama mengemban amanah dari masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang pengurus BPD bahwa :

“ Mengingat bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa itu adalah mitra kerja maka antara keduanya seharusnya menciptakan

⁴⁰Saipuddin (46 Tahun), Kepala Desa Pa'nakkukang, *Wawancara*. Gowa, 22 Januari 2016

kondisi kerja yang harmonis, tidak saling menjatuhkan melainkan harus dapat meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerja sama yang baik dalam proses pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera ”.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan pengamatan langsung di lapangan maka dapat dipahami bahwa tarik menarik kepentingan dalam implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terjadi di Desa Pa'nakkukang adalah wujud ketidak matangan para penyelenggara pemerintahan dalam menyikapi suatu proses demokrasi. Jadi menurut pendapat penulis Berdasarkan hasil analisa dari apa yang dikemukakan tentang kedudukan dan fungsi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada dasarnya setara, bahkan mereka harus saling sinergi antara satu dengan yang lainnya. Dan perbedaan pandangan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dapat di atasi dengan menyamakan visi dan misi dan saling menghormati dan menghargai serta mengesampingkan arogansi masing-masing, Supaya berpengaruh positif terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa yang selalu berpihak pada kepentingan masyarakat desa, sehingga keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu kemajuan desa.

⁴¹Parawansa Dg Rupa (52 Tahun), Anggota BPD, Wawancara, Gowa 27 Januari 2016

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas uraian Bab-bab terdahulu, maka penulis mencoba mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, terkait dengan fungsi BPD dalam menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari Tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan Desa telah dilaksanakan dengan baik dan juga melibatkan partisipasi masyarakat, fungsi pengawasan dari BPD terhadap jalannya pemerintahan desa yang dilaksanakan pemerintah desa sudah cukup baik dalam hal mengawasi peraturan desa dan Kepala Desa, dan pemerintah desa pun saat ini masih menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah di atur, Namun partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan jalannya peraturan desa masih sangat kurang. Dan terkait dengan implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah aspirasi masyarakat desa Pa'nakkukang belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan. Fungsi menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlalu efektif, sesuai apa yang di dapatkan peneliti di lapangan bahwa, memang masih ada beberapa warga masyarakat di Desa pa'nakkukang Kurang begitu mengetahui tugas dan wewenang dari BPD, karna kurangnya sosialisasi dari BPD kepada Masyarakat berkenaan dengan tugas dan fungsinya, di luar dari tokoh masyarakat yang ada di setiap dusun.

2. faktor yang menjadi kendala pemerintah desa dan BPD dalam menjalankan hubungan pemerintahan di antaranya yaitu: *Partisipasi Masyarakat*, Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah membuat masyarakat yang ada di desa pa'nakkukang cenderung tidak peduli akan hak partisipasinya dalam pemerintahan desa dan enggan terlibat dalam mempengaruhi kebijakan publik. *Tingkat pendidikan anggota BPD*, tingkat pendidikan pengurus BPD desa Pa'nakkukang masih tergolong rendah. Pada hal Stratifikasi atau tingkat pendidikan juga berpengaruh pada keberhasilan penerapan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa. *Kerjasama dengan Kepala Desa*, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa mempunyai kedudukan yang setara, tarik menarik kepentingan dalam implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terjadi di Desa Pa'nakkukang adalah wujud ketidak matangan para penyelenggara pemerintahan dalam menyikapi suatu proses demokrasi, dan kurangnya dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah kabupaten Gowa, menyebabkan BPD mengalami kesulitan dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa.

B. Implikasi Penelitian

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan implikasi dari penelitian sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan kerja sama antara pemerintah Kabupaten Gowa dengan Perguruan Tinggi, khususnya Fakultas Hukum untuk memberikan pembekalan mengenai *legal drafting* kepada BPD dan pemerintah Desa.
2. BPD sebagai unsur dari pemerintahan desa, dengan wewenang menggali, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat harus lebih meningkatkan sosialisasi mengenai tugas dan fungsi BPD kepada Masyarakat.
3. Antara pemerintah desa dan BPD adalah mitra dalam pemerintahan desa, untuk itu mereka harus saling sinergi antara satu dengan yang lainnya, dan menghormati dan menghargai serta mengesampingkan arogansi masing-masing, semata-mata untuk kemajuan desa.
4. Pemerintah dan masyarakat agar bisa saling bersinergi untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

AAGN Ari Dwipayana, dkk, *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta, CV Kathoda, 2005

Citra Umbara. *Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2015 Tentang Desa*. Bandung: Citra Umbara, 2015

MPA, Drs. Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia* Cet. X; Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2010.

Reality, Tim, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia* Surabaya: Reality Publisher, 2008

Rusdi, Muh. *Hadits Tarbawiy*. Cet: II Makassar: Alauddin Press, 2015. h. 125-126

Sarman dan Mohammad taufik Makarso, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, cet pertama, jakarta: Rineka cipta 2012

Sudjatmiko, Budiman dan Zakaria, Yando . *Desa Hebat, Indonesia Kuat!* Cet: 1 Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2014.

Syah, Rahman. *Menjawab Harapan rakyat Refleksi pemikiran membangun Gowa*. Cet. 1; Makassar : Media Pustaka Utama, 2010

Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh* Cet. Ke 2 Jakarta: Raja grafindo persada, 2004

Widjaja, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* .

Tangga Pustaka. *Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahannya*, Cet: 1 Jakarta: Tangga Pustaka, 2009

Ahnan Asy, Maftuh. *Kumpulan Hadits Terpilih Shahih Bkhari*, Surabaya: Terbit Terang, 2003

Adisasmita, H. Rahardjo. *Pembangunan Perdesaan pendekatan Partisipatif, tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Cet: 1 Jogyakarta, Graha Ilmu, 2013

B. Skripsi

M.Firman hadi “*Hubungan fungsional Antara Pemerintah Desa Dengan BPD Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*”. Jurnal ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013.

Somadi Alfaqhi “*Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Perdes (Studi di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)*” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Ratna sofiana “*tinjauan yuridis peran badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam peningkatan demokrasi di kecamatan kasihan kabupaten bantul*,” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

Ulfatul Istiqlaliyah “*Kerjasama Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenap)*”. Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

C. Peraturan-Peraturan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

D. Situs Internet

- <http://blogspot.com/2014/bpd-sebagai-lembaga-desa>,
- [http://www. Pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/.html](http://www.Pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/.html)
- <http://.pengertian-para-ahli.com/pngertian-politik/.html>.
- <http://.blogspot.com/2012/05/proposal-penelitian.html>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap, **Munawir Kadir**, lahir di parangma'lengu 08 April 1995. Merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami isteri, yaitu bapak bernama H. Abd Kadir Dg Kulle dan Ibu Ramlah Dg Ni'ni. Penulis sekarang bertempat tinggal di Desa Pa'nakukang, Kecamatan Pallangga, Kab. Gowa. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Inpres Parangma'lengu pada tahun 2006, dan selanjutnya melanjutkan pendidikan di MTS Muhammadiyah Lempangang Panciro dan menyelesaikannya pada tahun 2009, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke SMK Negeri 1 Pallangga dan menyelesaikannya pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2012 Penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) jurusan Ilmu Hukum di Universitas islam Negeri alauddin Makassar dan lulus pada tahun 2016.

Dengan ketekunan , motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan serta permulaan bagi penelitian lanjutan mengenai hubungan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pembangunan desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R